



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Jakarta Nomor 27, Bandung 40272
Telepon (022) 7272185 Faximili (022) 7219273
Laman : <http://jabar.kemenkum.go.id> Email : kanwiljabar@kemenkumham.go.id

Nomor : W.11.PR.03-112
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian LKjIP TA. 2024
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat

7 Januari 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
Di Jakarta

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan sebagai bentuk akuntabilitas serta transparansi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep Sutandar

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



20
24



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini menguraikan capaian target, permasalahan yang dialami serta solusi yang diambil yang mewarnai kinerja selama periode Tahun Anggaran 2024. Apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja baik dan dedikasi yang tak kenal waktu dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Kita tingkatkan terus kinerja kita dengan tetap berpegang pada Tata Nilai PASTI dan Ber-AKHLAK menuju Jawa Barat Kahiji!

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan ucapan terimakasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan datang.



Kepala Kantor Wilayah,

Masjuno

DAFTAR ISI

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

4

BAB I - PENDAHULUAN

- 5 - Latar Belakang
- 5 - Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 13 - Maksud dan Tujuan
- 13 - Aspek Strategis
- 14 - Isu Strategis

16

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

- 17 - Rencana Strategis
- 23 - Perjanjian Kinerja

28

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

- 29 - Capaian Kinerja Organisasi
- 82 - Realisasi Anggaran
- 84 - Capaian Kinerja Anggaran
- 86 - Capaian Kinerja Lainnya

100

BAB IV - PENUTUP

- 101 - Kesimpulan
- 101 - Saran

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam prosesnya.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki 18 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki PAGU sebesar Rp. 52.403.338.000 yang dibagi ke dalam 9 DIPA. Per tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran sudah mencapai 94.79% atau sebesar Rp. 49.674.681.437.

Dari sisi kinerja anggaran, nilai rata-rata IKPA dari 9 DIPA adalah 99.26 dan nilai SMART dibagi menjadi 2 penilaian yaitu sangat baik dan baik berdasarkan data per-November 2024.

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat merupakan instansi vertikal di wilayah yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jawa Barat dan membawahi 51 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan masing-masing Unit Eselon 1.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mendukung dan menyukseskan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi untuk melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu ;

- Tugas : Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang-undangan.
- Fungsi :
 1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
 2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Pemasyarakatan;
5. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dibagi memiliki 4 divisi yang dibawah oleh kepala divisi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

▪ Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

▪ Fungsi

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

▪ Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

- **Fungsi**

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Pemasyarakatan

- **Tugas**

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.

- **Fungsi**

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan,

perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Masyarakat;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4. Divisi Keimigrasian

▪ Tugas

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah.

▪ Fungsi

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) per Desember 2024, jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah sebagai berikut ;

NO	DIVISI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KAKANWIL	1	0	1
2	DIVISI ADMINISTRASI	41	34	75
3	DIVISI PEMASYARAKATAN	26	8	34
4	DIVISI KEIMIGRASIAN	12	9	21
5	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	34	40	74
	TOTAL	114	91	205

Berikut sebaran pegawai pada masing-masing divisi

SEBARAN PEGAWAI



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat membawahi 51 Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik pemsyarakatan maupun imigrasi dengan rincian sebagai berikut ;

➤ Kantor Imigrasi

1. Kanim Kelas I TPI Bandung Jl. Surapati No. 82, Bandung
2. Kanim Kelas I Non TPI Bogor Jl. A. Yani No. 19, Kota Bogor
3. Kanim Kelas II Non TPI Bekasi Jl. Raya Perjuangan No. 100, Kota Bekasi
4. Kanim Kelas II TPI Cirebon Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No, 51, Kabupaten Corebon
5. Kanim Kelas II Non TPI Depok Jl. Boulevard Grand Depok City, Kota Depok
6. Kanim Kelas II Non TPI Karawang Jl. Jenderal A. Yani No. 18, Karawang
7. Kanim Kelas II Non TPI Sukabumi Jl. Lkr Selatan No. 7, Kota Sukabumi
8. Kanim Kelas II Non TPI Tasikmalaya Jl. Letnan Harun, Kabupaten Tasikmalaya
9. Kanim Kelas III Non TPI Cianjur Jl. Raya Bandung No. 61, Kabupaten Cianjur

➤ **Lembaga Pemasarakatan**

1. Lapas Kelas I Cirebon Jl. Kesambi No. 38, Kota Cirebon
2. Lapas Kelas I Sukamiskin Jl. A.H.Nasution No. 114 Kota Bandung
3. Lapas Kelas IIA Banceuy Jl. Soekarno Hatta No. 187, Kota Bandung
4. Lapas Kelas IIA Bekasi Jl. Pahlawan No. 1, Kota Bekasi
5. Lapas Kelas IIA Bogor Jl. Paledang No. 2, Kota Bogor
6. Lapas Kelas IIA Cibinong Jl. Taman Makam Pahlawan No. 2, Kabupaten Bogor
7. Lapas Kelas IIA Cikarang Jl. Cilampayan, Kabupaten Bekasi
8. Lapas Kelas IIA Karawang Jl. Surotokunto No. 110, Karawang
9. Lapas Kelas IIA Kuningan Jl. Siliwangi No. 2, Kabupaten Kuningan
10. Lapas Kelas IIA Subang Jl. Palabuan No. 3, Kabupaten Subang
11. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Jl. Pengayoman, Kabupaten Bogor
12. Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur Jl. Pengayoman, Kabupaten Bogor
13. Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung
14. Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Jl. Wijaya Kusuma, Kabupaten Cirebon
15. Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung Jl. Pacuan Kuda No. 3, Kota Bandung
16. Lapas Kelas IIB Banjar Jl. Pelita Lingkungan Sukamanah, Kota Banjar
17. Lapas Kelas IIB Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 146, Kabupaten Ciamis
18. Lapas Kelas IIB Cianjur Jl. Aria Cikondang No. 75, Kabupaten Cianjur
19. Lapas Kelas IIB Garut Jl. Kyai H. Hasan Arif No. 9, Kabupaten Garut
20. Lapas Kelas IIB Purwakarta Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja No. 14, Kabupaten Purwakarta
21. Lapas Kelas IIB Indramayu Jl. Gatot Subroto No.4, Kabupaten Indramayu
22. Lapas Kelas IIB Majalengka Jl. Raya K.H.Abdul Halim No. 254, Kabupaten Majalengka
23. Lapas Kelas IIB Sukabumi Jl. Lettu Bakri No. 17, Kota Sukabumi
24. Lapas Kelas IIB Sumedang Jl. Prabu Geusan Ulun No. 40, Kabupaten Sumedang
25. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya Jl. Otista No. 1, Kabupaten Tasikmalaya
26. Lapas Kelas IIB Warungkiara Jl. Pelabuhan Ratu Km. 30, Kabupaten Sukabumi
27. Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Sukahati, Kabupaten Bogor
28. LPKA Kelas II Bandung Jl. Pacuan Kuda No. 3A, Kota Bandung

➤ **Rumah Tahanan Negara**

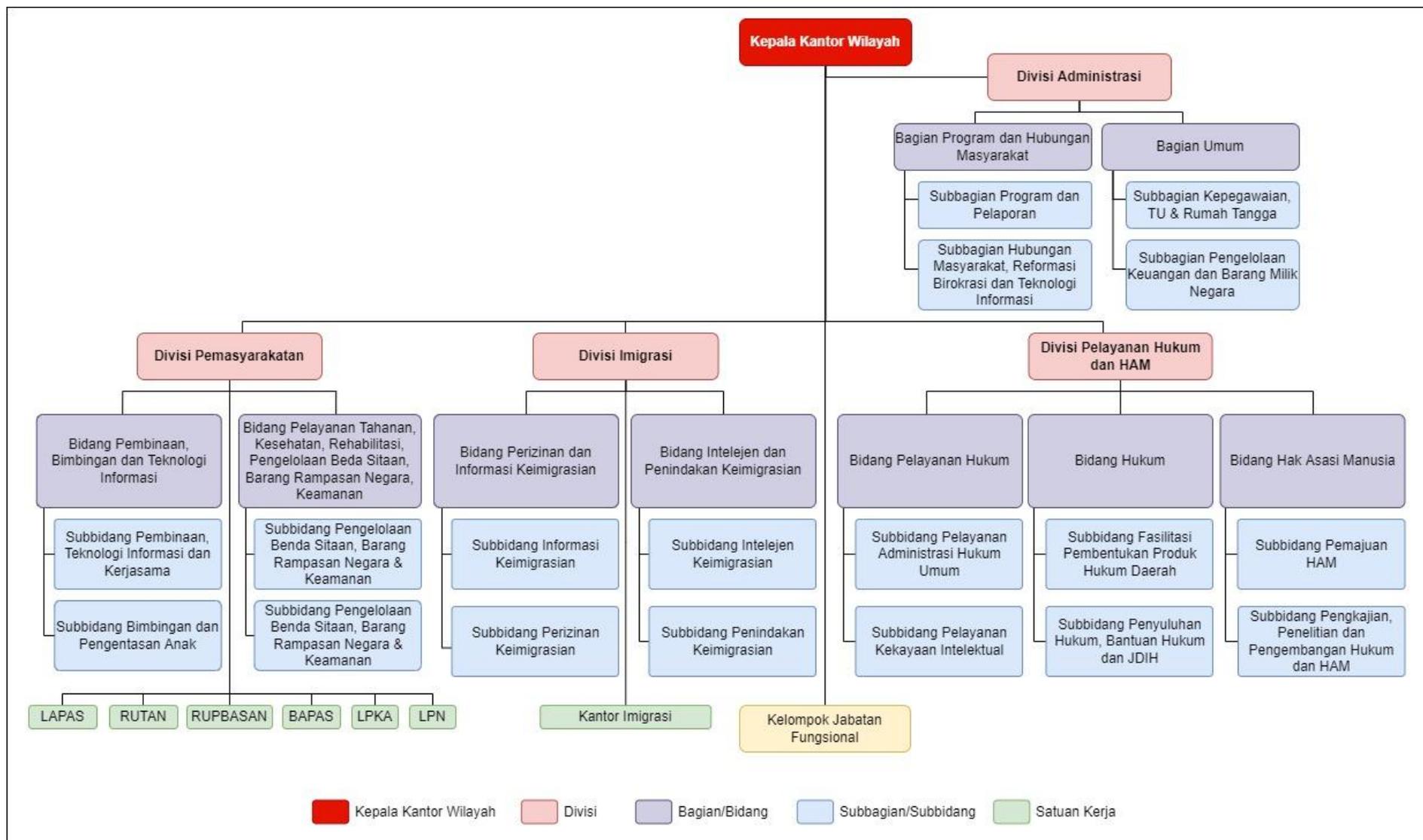
- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Rutan Kelas I Bandung | Jl. Jakarta No. 29, Kota Bandung |
| 2. Rutan Kelas I Cirebon | Jl. Benteng No. 1, Kota Cirebon |
| 3. Rutan Kelas I Depok | Jl. M. Nasir No. 52, Kota Depok |
| 4. Rutan Kelas IIB Garut | Jl. RD. Dewi Sartika No. 2, Kabupaten Garut |
| 5. Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung | Jl. Raden Roesbandi, Kota Bandung |

➤ **Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Rupbasan Kelas I Bandung | Jl. Pacuan Kuda No. 10, Kota Bandung |
| 2. Rupbasan Kelas I Cirebon | Jl. Melati No. 10, Kota Cirebon |
| 3. Rupbasan Kelas II Indramayu | Jl. Terusan Sindang KM. 3, Kabupaten Indramayu |

➤ **Balai Pemasyarakatan**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Bapas Kelas I Bandung | Jl. Ibrahim Adjie No. 431, Kota Bandung |
| 2. Bapas Kelas I Cirebon | Jl. Dr. Wahidin S. No. 54, Kota Cirebon |
| 3. Bapas Kelas II Bogor | Jl. KH. Term. M. Falak No. 3, Kota Bogor |
| 4. Bapas Kelas II Garut | Jl. H. Hasan Arif, Kabupaten Garut |
| 5. Bapas Kelas II Bekasi | Jl. Cilampayang, Cikarang, Kabupaten Bekasi |
| 6. Bapas Kelas II Subang | Jl. Veteran No. 5, Kabupaten Subang |



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu, Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat merupakan instansi vertikal dan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsi di wilayah. Berikut beberapa aspek penting keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

- 1) Melaksanakan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 2) Melaksanakan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 3) Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Melaksanakan penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 5) Melaksanakan pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan serta pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah sebagai berikut ;

1. Wilayah Kerja yang Luas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan besaran wilayah 35.377 KM² yang mencakup 27 Kabupaten/Kota. Wilayah yang besar tentunya berdampak terhadap belum optimalnya pemberian layanan publik kepada masyarakat. Sebagai contoh;

- Belum optimalnya harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) oleh pemerintah daerah maupun DPRD;
- Belum optimalnya sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat dalam hal Hak Kekayaan Intelektual;
- Tingginya jumlah notaris yang tersebar di wilayah Jawa Barat sehingga menyulitkan dalam hal monitoring dan pengawasan;

2. Tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Sejumlah LAPAS dan RUTAN di wilayah Jawa Barat saat ini mengalami *over capacity*, keadaan ini tentunya menjadi masalah yang cukup *crusial* dikarenakan pengawasan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi tidak optimal. Hal ini terjadi karena jumlah WBP yang berlebih tidak berbanding lurus dengan satuan pengamanan di LAPAS/RUTAN, hal tersebut tentunya dapat memicu/menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, hal lainnya yang mungkin terjadi yaitu gangguan kesehatan, kegiatan kemandirian yang tidak maksimal karena tidak dapat diikuti oleh seluruh WBP dan hal-hal lainnya.

F. Sistematika Pelaporan

❖ Kata Pengantar

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

❖ Ringkasan Eksekutif

Menyajikan ringkasan tentang isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

❖ BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

❖ BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

❖ BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

❖ BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

❖ Lampiran

Bagian ini melampirkan data-data pendukung dalam pencapaian kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa fokus pemerintah adalah “Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomo 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Wilayah Jawa Barat mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 'PASTI' :

1) Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengacu kepada Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomo 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, sebagai berikut;

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia	Pembentukan regulasi	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah
				Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang perundang-undangan
			Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan
				Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah
		Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan
				Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah		

				Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan
			Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan
		Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
			Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan
			Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pemsarakatan di wilayah
			Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan

				Keimigrasian di Lewilayahan yang diterima
			Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
				Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
			Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah
			Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi
				Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi
			Meningkatnya Desa Sadat Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadat Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap

				Total Usulan Kantor Wilayah
2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti
			Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
				Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

Tata Nilai *Core Value* ASN Ber-AKHLAK

Selain Tata Nilai PASTI, terdapat *core value* ASN yang menjadi pedoman insan pengayoman dan seluruh ASN di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu ber-AKHLAK. Tata nilai diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021 yang merupakan *employee branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ber-AKHLAK merupakan akronim dari kata berikut;

- a) **Berorientasi** Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;
- b) **Akuntabel** yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c) **Kompeten** yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

- d) **Harmonis** yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e) **Loyal** yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f) **Adaptif** yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;
- g) **Kolaboratif** yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut;

1. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah;
5. Dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki 4 Divisi yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, adapun rincian Perjanjian Kinerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
DIVISI ADMINISTRASI				
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	Rp. 24.559.946.000

		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 indeks	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM				
2.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah (target Rp. 192.054.510.000)	6%	Rp. 2.601.305.000
3.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Rp. 3.173.670.000
4.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	30%	Rp. 516.307.000
5.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah	Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Rp. 1.534.586.000
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah (target : 47.899)	20%	Rp. 872.748.000
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Rp. 363.480.000
7.	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	Rp. 108.900.000
8.	Meningkatnya pemerintah daerah yang	Presentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang	50%	Rp. 61.016.000

	melaksanakan program aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan Hak Asasi Manusia di wilayah	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan		
		Presentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan	25%	Rp. 60.338.000
		Presentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	35%	Rp. 70.838.000
		Presentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan	75%	Rp. 76.188.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di kewilayahan	3.33 indeks	Rp. 57.164.000
9.	Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia	Presentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan	90%	Rp. 35.876.000
10.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen	Rp. 52.601.000
		Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp. 91.458.000
11.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Rp. 101.149.000
12.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	Rp. 3.968.000

		Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	Rp. 778.910.000
13.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	Rp. 164.578.000
14.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp. 281.389.000
DIVISI PEMASYARAKATAN				
15.	Terwujudnya penegakan hukum masyarakat di wilayah	Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah	3.6 indeks	Rp. 1.535.149.000
16.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%	
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 indeks	
DIVISI KEIMIGRASIAN				
17.	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Presentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	Rp. 1.632.098.000

18.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	
		Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3.1 indeks	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran Kinerja harus dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi eperformance.kemenkumham.go.id. Aplikasi *e-performance* bertujuan untuk memantau capaian kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah dilaksanakan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Berikut capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ;

❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIVISI ADMINISTRASI)

1. Indikator Kinerja terkait Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan Pembangunan zona integritas untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan indeks reformasi birokrasi kementerian, kantor wilayah sebagai satuan kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melakukan hal-hal yang meliputi pembangunan zona integritas dan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi melalui pemenuhan data dukung dari rencana aksi yang telah ditetapkan setiap triwulan yang selanjutnya akan dievaluasi secara berjenjang.

Tahun 2024 terdapat 32 rencana aksi reformasi birokrasi dan seluruhnya telah terlaksana.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Kanwil yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{32}{32} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sehingga capaian target kinerja terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2024 adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana startegis karena indikator tersebut tidak terdapat pada rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien dan transparan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat untuk mencapai realisasi 100% dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada Seluruh pegawai dan Satuan Kerja tentang Road Map Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disertai dengan internalisasi indikator pelaksanaannya;
- 2) Penyampaian Rencana Aksi setiap triwulan melalui sumaker kepada tiap bagian di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis disertai dengan target pemenuhan setiap triwulan;
- 3) Melakukan monitoring dan Evaluasi berkala pertriwulan terhadap data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

2. Indikator Kinerja terkait Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan layanan kesekretariatan yang diberikan oleh instansi kepada seluruh pegawai, maka dianggap perlu untuk melakukan survei terhadap layanan yang telah diberikan, guna memberikan masukan dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai. Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Nasional (BSK).

Berikut hasil survei yang telah dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

SEPTEMBER	OKTOBER
4.00	3.95
RATA-RATA	3.97

Berdasarkan data di atas, rata-rata nilai hasil survei adalah 3.97. Maka capaian target dapat dihitung menggunakan rumus ;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3.91}{3.10} \times 100\% \\
 &= 126\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 indeks	3.97 indeks	126%

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja kegiatan terkait indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan adalah 126%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana startegis karena indikator tersebut tidak terdapat pada rencana strategis tahun sebelumnya.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Berikut hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan layanan kesekretariatan pada Kantor Wilayah;

- 1) Telah ditetapkan perencanaan kegiatan dalam 1 tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Target Kinerja dan RKA-K/L, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi beserta anggaran 1 tahun sudah jelas;
- 2) Pemberian informasi yang dilakukan secara aktif kepada masing-masing pegawai terkait informasi kepegawaian, keuangan dan informasi lainnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap hak-hak pegawai;
- 3) Pimpinan aktif memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada jajaran serta penguatan tentang pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) serta internalisasi Tata Nilai PASTI dan berAKHLAK dalam berkinerja;

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)

1. Indikator Kinerja terkait Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan negara dari masyarakat yang berasal dari penerimaan non-pajak yang dihasilkan dari pemberian layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Jawa Barat seperti layanan badan hukum, kenotariatan, pewarganegaraan, fidusia, partai politik, dsbnya.

Berikut capaian PNBP Ditjen AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat 4 tahun terakhir ;

PNBP AHU			
TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021
190.207.450.000	181.183.500.000	170.275.150.000	177.486.050.000

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melalui Subbidang AHU ditargetkan memiliki peningkatan PNBP AHU sebesar 6%. Berikut perhitungan realisasi target menggunakan rumus manual IKU;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah PNBP tahun berjalan} - \text{realisasi PNBP (T-4, T-3, T-2)}}{\text{Realisasi PNBP (T-4, T-3, T-2)}} \times 100\% \\
 &= \frac{190.207.450.000 - 176.314.900.000}{176.314.900.000} \times 100\% \\
 &= \frac{13.892.550.000}{176.314.900.000} \times 100\% \\
 &= 7.87\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	7.87%	131.16%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.87\%}{6\%} \times 100\% \\
 &= 131,16\%
 \end{aligned}$$

Maka, dapat disimpulkan bahwa target peningkatan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah Jawa Barat telah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	6,41%	6%	7.87%

Berdasarkan data perbandingan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara persentase kenaikan tidak begitu signifikan, hanya sekitar 1.46%, namun secara nominal terjadi kenaikan yang cukup signifikan, PNBPN tahun 2023 adalah Rp. Rp. 181.183.500.000 dan tahun 2024 sebesar Rp. 190.207.450.000.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	6%

Capaian target tahun 2024 adalah 7.87% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen rencana strategis, capaian tahun 2024 sangat baik dan tinggi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka mencapai target PNBPN Direktorat Jenderal AHU di wilayah yang telah ditargetkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah sebagai berikut;

- 1) Penyebarluasan informasi terkait layanan Administrasi Hukum Umum melalui berbagai media seperti pemasangan *billboard* di titik-titik strategis di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Melakukan kegiatan sosialisasi secara luring terkait Layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah kepada masyarakat seperti sosialisasi kenotariatan, pewarganegaraan, badan usaha, dsbnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat;

- 3) Sosialisasi secara daring dengan memanfaatkan media sosial dengan pembuatan konten grafis yang kekinian guna meningkatkan minat masyarakat.

2. Indikator terkait Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Salah satu tugas dan fungsi Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum di wilayah adalah melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kota dan kabupaten agar seluruh notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari kewenangannya.

Maka dari itu, penting untuk berperan aktif dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat. Berikut rekapitulasi pengaduan masyarakat. Berikut rekapitulasi pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah ;

BULAN	MKNW	MPWN
Januari	22	4
Februari	11	3
Maret	18	4
April	10	0
Mei	12	1
Juni	29	0
Juli	30	0
Agustus	27	1
September	19	0
Oktober	27	0
November	20	1
Desember	20	0
TOTAL	258 PENGADUAN	

Berdasarkan data pada tabel di atas, berikut perhitungan capaian presentase laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\% \\
 &= \frac{258}{258} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Maka, realisasi presentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jawa Barat yang telah diselesaikan adalah 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 111\%$$

Sehingga, capaian indikator kinerja terkait penyelesaian pengaduan terkait dugaan pelanggaran notaris adalah 111%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tabel di bawah ini dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan target dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang karena Kantor Wilayah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh pengaduan masyarakat yang masuk.

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	84%	119%	90%	111%

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Berdasarkan target jangka menengah dalam rencana strategis yang diuraikan pada tabel di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja 100% pada tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, karena seluruh pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris di wilayah Jawa Barat telah ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	84%	90%

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka mendukung pencapaian target, upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris adalah rutin mengadakan sidang pemeriksaan setiap 2 minggu sekali dan aktif berkomunikasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan penyidik.

❖ PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

1. Indikator Kinerja terkait Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat maka subbidang pelayanan kekayaan intelektual wajib melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, walaupun pengawasan tersebut telah dilakukan secara rutin, tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang diketahui dari pengaduan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, subbidang kekayaan intelektual wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh pengaduan yang masuk. Untuk menghitung capaian kinerja presentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah dapat menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\%$$

Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik dan sesuai dengan SOP, kebijakan serta tata nilai memungkinkan tidak adanya pengaduan masyarakat yang masuk, hal tersebut terjadi pada tahun 2024 dimana tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	30%	-	-

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Terdapat penurunan target dalam hal penyelesaian pengaduan kekayaan intelektual di wilayah yang sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 menjadi 30%. Namun, pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat tidak memiliki pengaduan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual.

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	100%	100%	30%	-

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Terdapat penurunan target pada dokumen rencana strategis tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya, namun capaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	100%	100%	100%	30%

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah menyebabkan tidak adanya pengaduan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah. Adapun hal-hal yang sudah dilakukan yaitu;

- 1) Melakukan edukasi pencegahan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Jawa Barat baik kepada masyarakat umum, pelaku usaha UMKM, perguruan tinggi;

- 2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual juga melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di wilayah serta melakukan evaluasi terkait penegakan hukum di wilayah;
- 3) Menyediakan pendampingan penanganan aduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di wilayah jika terjadi.

2. Indikator Kinerja terkait Presentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat yang memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di wilayah adalah dengan melakukan jemput bola dengan cara melakukan kegiatan RuKI atau Guru KI. Program ini digagas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terkait Kekayaan Intelektual.

Selama tahun 2024, kegiatan RuKI dilaksanakan sebanyak 7 kali. Berikut detail kegiatan RuKI;

Waktu Kegiatan	Jumlah Peserta Nilai Pre-Test >90	Jumlah Peserta Nilai Post-Test >90	TOTAL
April	35 orang	90 orang	680 orang
	31 orang	82 orang	
Mei	27 orang	51 orang	
November	15 orang	33 orang	
	82 orang	139 orang	
	31 orang	48 orang	
	4 orang	12 orang	
TOTAL	225 orang	455 orang	

$$= \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi yang memahami KI}}{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{455}{680} \times 100\%$$

$$= 66,91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari data pada tabel di atas maka diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai 66,91%. Nilai tersebut dihitung dari peningkatan pemahaman peserta yang diikuti dengan peningkatan nilai *post test*.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	66.91%	95.58%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{66.91\%}{70\%} \times 100\% \\
 &= 95.58\%
 \end{aligned}$$

Maka, capaian kinerja terkait persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah adalah 95.58%

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana startegis karena indikator tersebut tidak terdapat pada rencana strategis tahun sebelumnya.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan RuKI (Guru KI) tidak lepas dari pelaksanaan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sekolah terkait. Selain itu, pemberian materi yang menarik menghasilkan pemahaman yang baik untuk siswa/i, hal tersebut terlihat dari peningkatan nilai *post-test* dibandingkan dengan nilai *pre-test*.

3. Indikator Kinerja terkait Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Salah satu tugas dan fungsi Subbidang Kekayaan Intelektual di wilayah adalah menyelenggarakan pelayanan kekayaan intelektual, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diharapkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap permohonan kekayaan intelektual di wilayah.

Tahun 2023 total permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah Jawa Barat mencapai 37.227 permohonan dan pada tahun 2024 ditargetkan peningkatan permohonan sebesar 20%.

Berikut rekapitulasi permohonan kekayaan intelektual tahun 2024 di wilayah Jawa Barat;

TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	TOTAL
	3.693	2.687	2.024	42.801 permohonan
TRIWULAN II	APRIL	MEI	JUNI	
	1.774	3.029	3.361	
TRIWULAN III	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
	5.009	4.961	4.330	
TRIWULAN IV	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
	4.304	5.154	2.475	

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\% \\
 &= \frac{42.801 - 37.227}{37.227} \times 100\% \\
 &= 14,97\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, persentase peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah adalah 14,97% yang artinya belum mencapai target.

Maka, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{14,97\%}{20\%} \times 100\% \\
 &= 74,85\%
 \end{aligned}$$

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	842 permohonan	38.537 permohonan	20%	14,97%

Jika membandingkan target tahun 2023 dan 2024 terdapat perbedaan satuan target, yang semula satuan angka kemudian menjadi persentase.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi jauh melebihi target, sedangkan di tahun 2024 target tidak tercapai, namun jika melihat satuan angka, terjadi peningkatan permohonan sebesar 14,97% atau terdapat sejumlah 42.801 permohonan, yang artinya terdapat kenaikan jumlah permohonan sebesar 5.574 dari tahun 2023.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	840 permohonan	842 permohonan	842 permohonan	20%

Jika melihat realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen rencana strategis (renstra), dapat disimpulkan bahwa realisasi target tahun 2024 sudah sangat melebihi target jangka menengah dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Kegagalan

Pada tahun 2024 jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat adalah 42.801 permohonan, sedangkan tahun 2023 sebanyak 38.537 permohonan, secara angka sebenarnya terjadi peningkatan jumlah permohonan, namun belum mencapai 20% peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, Subbidang Kekayaan Intelektual telah melakukan beberapa hal untuk mendukung peningkatan permohonan seperti; melakukan kegiatan diseminasi, membukan layanan konsultasi virtual (LoVi) dan membuka layanan di Mall Pelayanan Publik sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan.

❖ PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (FPPHD)

1. Indikator Kinerja terkait Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan

harmonisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, digunakan aplikasi e-perdajura untuk mempermudah permohonan harmonisasi. Permohonan yang telah masuk akan segera diselesaikan dalam kurun waktu 15 hari sesuai dengan SOP yang berlaku.

Salah satu tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah melakukan fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang dilakukan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD).

Jumlah permohonan yang masuk dan telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut;

TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	TOTAL
	37	34	33	421 permohonan
TRIWULAN II	APRIL	MEI	JUNI	
	39	57	39	
TRIWULAN III	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
	74	62	46	
TRIWULAN IV	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	

Berikut rumus untuk menghitung realisasi rancangan produk daerah yang telah difasilitasi ;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah raperda dan raper kepala daerah yang selesai}}{\text{Total permohonan harmonisasi raperda}} \times 100\% \\
 &= \frac{421}{421} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Seluruh permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang masuk ke kantor wilayah seluruhnya terfasilitasi maka realisasinya adalah 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= 125\%
 \end{aligned}$$

Maka, capaian target terkait rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah adalah 125%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	80%	100%

Tidak terdapat perubahan target di tahun 2024, realisasi target pun tidak berubah yaitu 100%. Realisasi yang sama antara tahun 2023 dan 2024 adalah karena seluruh permohonan fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang masuk ke kantor wilayah, seluruhnya (sesuai dengan persyaratan) pasti akan ditindaklanjuti/difasilitasi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	80%

Merujuk pada tabel di atas, tidak terdapat perubahan target sejak tahun 2021 hingga 2024. Jika membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis maka disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 telah melampaui target.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

- 1) Kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum daerah merupakan kegiatan bersama pihak eksternal, maka untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan dilakukan komunikasi dan koordinasi yang rutin dengan pihak terkait;
- 2) Selain itu, mengingat wilayah Jawa Barat yang cukup luas dan banyaknya permohonan fasilitasi dari pihak pemerintah daerah setiap bulan, maka untuk mengantisipasi penumpukan permohonan, pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan melalui Kabayan PASTI yaitu portal pendaftaran secara *online* yang dirilis oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

2. Indikator Kinerja terkait Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong reformasi hukum. Mereka memiliki tanggungjawab untuk melakukan harmonisasi dan konsultasi seluruh rancangan peraturan daerah. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada tanggal 14 Maret 2024 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah dan DPRD.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	38 orang	104,16%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= 104,16\%$$

Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 104,16%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	24 orang	24 orang	38 orang

Tidak terdapat kenaikan target indikator kinerja kegiatan jika dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024, namun terdapat kenaikan realisasi dari target yang ditetapkan popada tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang

Berdasarkan target jangka menengah dalam rencana strategis yang diuraikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Beberapa hal penting yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yang maksimal adalah melakukan koordinasi kegiatan secara rutin antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten Kota di wilayah Jawa Barat.

❖ PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BPHN)

1. Indikator Kinerja terkait Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Analisis dan evaluasi produk hukum adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan Sumber Daya Air yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah tidak berlaku.

Berikut rumus untuk menghitung realisasi target indikator kinerja kegiatan tersebut;

$$x = a + b + c + \dots + n$$

a = analisis dan evaluasi produk hukum a

b = analisis dan evaluasi produk hukum b

c = analisis dan evaluasi produk hukum c

n = analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Jadi, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator kinerja kegiatan terkait jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak dapat dibandingkan dengan target tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana startegis karena indikator tersebut tidak terdapat pada rencana strategis tahun sebelumnya.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak pemerintah daerah karena terdapat rangkaian kegiatan yang panjang dimulai dari proses rapat analisis dan evaluasi oleh tim pokja dari kantor wilayah, rapat pelaksanaan analisis dan evaluasi bersama pemerintah daerah hingga pembuatan laporan akhir.

2. Indikator Kinerja terkait Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah melakukan fasilitasi perencanaan peraturan daerah dengan uraian sebagai berikut;

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	8 Agustus 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Hukum Daerah Kabupaten Bandung
2	12 September 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Hukum Daerah Kabupaten Bandung
3	27 September 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Hukum Daerah Kabupaten Bandung
4	9 Oktober 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Cimahi
5	17 Oktober 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Bandung
6	22 Oktober 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kab. Bandung
7	23 Oktober 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Cimahi
8	24 Oktober 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Bandung
9	8 November 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Bandung
10	12 November 2024	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Cimahi

Terdapat 10 kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan

$$x = a + b + c + \dots + n$$

a = analisis dan evaluasi produk hukum a

b = analisis dan evaluasi produk hukum b

c = analisis dan evaluasi produk hukum c

n = analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Telah dilaksanakan sepuluh kali kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dan menghasilkan 1 (satu) dokumen laporan akhir terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka, capaian kinerja tersebut adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak dapat dibandingkan dengan target tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Tidak dapat melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah dalam rencana startegis karena indikator tersebut tidak terdapat pada rencana strategis tahun sebelumnya.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak pemerintah daerah;
- 2) Inventarisasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Program Legislasi Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

3. Indikator Kinerja terkait Persentase Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

JDIH adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yaitu sistem informasi yang berisi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. JDIH

berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang akurat, mudah, dan cepat. Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.

Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki target sebesar 25% terkait presentase anggota JDIHN yang dikelola.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	48,27%	193,08%

$$= \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{28}{58} \times 100\%$$

$$= 48,27\%$$

Wilayah Jawa Barat memiliki anggota JDIHN sebanyak 58, akan tetapi yang aktif hanya sebanyak 28 anggota, sehingga realisasi atas persentase anggota JDIHN yang dikelola adalah 48,27%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	20%	53,44%	25%	48,27%

Terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, namun realisasi tahun 2024 telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	20%	20%	20%	25%

Realisasi tahun 2024 adalah 48,27% dan nilai tersebut telah melebihi target yang ada dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat berperan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh anggota JDH di wilayah Jawa Barat;
- Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota guna memastikan bahwa setiap instansi pemerintah aktif untuk ;
 - 1) Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan memanfaatkan informasi dokumen hukum;
 - 2) Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4. Indikator Kinerja terkait Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi
a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan layanan pendampingan hukum dalam beracara di pengadilan, bantuan hukum tersebut untuk perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Sebagai instansi vertikal di wilayah, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah memberikan 1.068 permohonan bantuan hukum dari total 1.185 permohonan yang masuk, berikut rinciannya;

	PERMOHONAN			YANG DIBERIKAN		
	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
TRIWULAN I	-	57	241	-	50	228
TRIWULAN II	APR	MEI	JUN	APR	MEI	JUN
	60	197	140	50	190	128
TRIWULAN III	JUL	AGS	SEPT	JUL	AGS	SEPT
	132	147	-	125	112	-
TRIWULAN IV	OKT	NOV	DES	OKT	NOV	DES
	64	118	29	61	102	22
TOTAL	1.185 Permohonan			1.068 Permohonan Diberikan		

$$= \frac{\text{Jumlah orang miskin diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.068}{1.185} \times 100\%$$

$$= \frac{1.068}{1.185} \times 100\%$$

= 90.12%

Berdasarkan data pada tabel di atas realisasi indikator kinerja terkait persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan di wilayah Jawa Barat mencapai 90.12%, realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%	90.12%	109.90%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{90.12\%}{82.00\%} \times 100\%$$

$$= 109.90\%$$

Maka, capaian persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah 109.90%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	81%	112,36%	82%	90.12%

Berdasarkan data pada tabel di atas, target tahun 2024 meningkat sebanyak 1% dari tahun 2023, jika membandingkan realisasi tahun 2023 dan 2024 dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat kenaikan target namun Kantor Wilayah dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	77%	81%	81%	82%

Terdapat kenaikan target dari tahun ke tahun sejak 2021, jika melihat capaian tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa realisasi telah melebihi target jangka menengah dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pemberian bantuan hukum non-litigasi;

- Membentuk kelompok kerja daerah dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027.
- Memberikan edukasi dan koordinasi dalam kegiatan upload dokumen pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan laporan pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus mendorong Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk aktif melaksanakan bantuan hukum;
- Berupaya memberikan kemudahan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dalam pelaksanaan bantuan hukum yang salah satunya dilaksanakan melalui dorongan kepada Rutan/Lapas serta kepada PBH untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pelaksanaan bantuan hukum.

5. Indikator Kinerja Terkait Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

	PERMOHONAN			YANG DIBERIKAN		
	JAN	FEB	MAR	JAN	FEB	MAR
TRIWULAN I	-	2	16	-	2	13
TRIWULAN II	APR	MEI	JUN	APR	MEI	JUN
	2	10	24	2	6	20
TRIWULAN III	JUL	AGS	SEPT	JUL	AGS	SEPT
	37	93	-	33	71	-
TRIWULAN IV	OKT	NOV	DES	OKT	NOV	DES
	7	23	24	7	21	25
TOTAL	237 Permohonan			200 Permohonan Diberikan		

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan bankum non litigasi yang diberikan kanwil}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{200}{237} \times 100\%$$

$$= 84,38\%$$

Sebanyak 200 permohonan bantuan hukum non-litigasi telah diberikan oleh Kantor Wilayah kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Jawa Barat atau telah terealisasi sebesar 84,38%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	84,38%	105,48%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{84,38}{80\%} \times 100\%$$

$$= 105,48\%$$

Maka, capaian presentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang telah diberikan di wilayah Jawa Barat adalah 105.48%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80%	82,60%	80%	84,38%

Berdasarkan data pada tabel di atas, tidak terdapat perubahan target pada tahun 2023 dan 2024, akan tetapi terjadi peningkatan realisasi pemberian bantuan hukum non-litigasi pada tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	79%	80%	80%	80%

Realisasi pemberian bantuan hukum non-litigasi pada tahun 2023 adalah 84,38% dan telah melampaui target jangka menengah dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pemberian bantuan hukum non-litigasi;

- Membentuk kelompok kerja daerah dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027.
- Memberikan edukasi dan koordinasi dalam kegiatan upload dokumen pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan laporan pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus mendorong Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk aktif melaksanakan bantuan hukum;
- Berupaya memberikan kemudahan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dalam pelaksanaan bantuan hukum yang salah satunya dilaksanakan melalui dorongan kepada Rutan/Lapas serta kepada PBH untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pelaksanaan bantuan hukum.

6. Indikator Kinerja terkait Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan Terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) adalah desa atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa atau kelurahan yang sadar hukum. Penetapan ini merupakan hasil dari pembinaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengusulkan sebanyak 100 desa/kelurahan dan seluruhnya diresmikan.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa atau kelurahan binaan dari kantor wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai	70%	100%	142,85%

Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah			
--	--	--	--

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142,85\%$$

Maka, realisasi atas indikator kinerja terkait persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum mencapai 100% dengan capaian sebesar 142,85% dari target 70%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	77,98%	70%	100%

Terdapat peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan pada tahun 2024, peningkatan tersebut dikarenakan sebanyak 100 desa/kelurahan yang diajukan, seluruhnya diresmikan. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 109 desa/kelurahan yang diajukan dan memenuhi syarat, namun hanya 85 desa/kelurahan yang diresmikan karena terdapat pembatasan kuota.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70%	70%	70%	70%

Target pada tahun 2024 adalah 70% dan terealisasi sebesar 100%, nilai tersebut telah mencapai/melampaui target jangka menengah yang ada dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Desa/kelurahan sadar hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk menunjang pencapaian target adalah;

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Kantor Wilayah dan Instansi Pemerintah di wilayah Jawa Barat;
- Melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan melalui peningkatan peran Kelompok Sadar Hukum;
- Peningkatan sinergitas antara perangkat desa setempat dan Aparat Penegak Hukum (APH).

❖ PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM (HAM)

1. Indikator Kinerja terkait Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pelayanan Komunikasi Nasional (YANKOMAS) adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut data pengaduan masyarakat periode Januari-Desember 2024;

TRIWULAN I	JAN	FEB	MAR	RERATA
SELESAI DITINDAKLANJUTI	5	6	2	100%
DIPROSES	0	0	0	
TRIWULAN II	APR	MEI	JUN	RERATA
SELESAI DITINDAKLANJUTI	1	1	1	100%
DIPROSES	0	1	1	
TRIWULAN III	JUL	AGS	SEPT	RERATA
SELESAI DITINDAKLANJUTI	4	2	-	100%
DIPROSES	0	0	-	
TRIWULAN IV	OKT	NOV	DES	RERATA
SELESAI DITINDAKLANJUTI	1	1	1	100%
DIPROSES	0	0	0	
TOTAL	24 PENGADUAN MASYARAKAT			

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{24}{24} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Terdapat 24 pengaduan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melalui Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	50%	100%	200%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{50\%} \times 100\% \\
 &= 200\%
 \end{aligned}$$

Karena seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Jawa Barat yang masuk telah ditindaklanjuti maka capaian indikator kinerja tersebut mencapai 200%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja terkait persentase dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi antara tahun 2023 dengan 2024 karena indikator tersebut tidak terdapat pada tahun sebelumnya (dokumen rencana strategis sebelum revisi).

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka mendukung capaian kinerja terkait persentase dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti adalah;

- Membuat POS Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang memudahkan akses masyarakat untuk membuat laporan pengaduan;

- Subbidang Pemajuan HAM melakukan penelahaan terhadap pengaduan yang masuk dan langsung ditindaklanjuti untuk mengetahui apakah terdapat unsur pelanggaran HAM atau tidak;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan POS YANKOMAS di seluruh Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat untuk memastikan bahwa kegiatan YANKOMAS berjalan dengan baik.

2. Indikator Kinerja terkait Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kegiatan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Kementerian/Lembaga/Daerah dilaksanakan pada bulan Juni. Pelaksanaan Diseminasi kepada para aparatur terkait pelatihan bahasa isyarat yang diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota se Jawa Barat dari total 27 Kabupaten/Kota dan peserta dari Kantor Wilayah yang bertugas di *front office*.

$$= \frac{\text{Jumlah K'L'D di wilayah yg mendapatkan diseminasi \& penguatan HAM}}{\text{Jumlah K'L'D di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{27} \times 100\%$$

$$= 55,55\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan	25%	55.55%	222%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{55,55\%}{25\%} \times 100\%$$

$$= 222\%$$

Maka, capaian indikator kinerja terkait persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia adalah 222%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan

tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia kepada pemerintah daerah didukung oleh persiapan kegiatan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah di wilayah Jawa Barat.

3. Indikator Kinerja terkait Presentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah selesai melaporkan hasil pemeriksaan dan pelaporan 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melalui aplikasi KKP HAM. Berdasarkan hasil penilaian, 25 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat Peduli HAM. Maka, rumus realisasi adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Kab'Kota di wilayah mendapat predikat peduli HAM}}{\text{Jumlah ab'Kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{25}{27} \times 100\% \\
 &= 92,59\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	35%	92,59%	264,54%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{92,59\%}{35\%} \times 100\% \\
 &= 264,54\%
 \end{aligned}$$

Realisasi Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat adalah 92,59% sehingga capaian kinerja sebesar 264,54%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Presentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	4 Instansi pemerintah	24 Instansi pemerintah	35%	92,59%

Terdapat perubahan target dari tahun 2023 ke tahun 2024, sebelumnya nilai satuan kemudian menjadi persentase, namun jika melihat nilai tersebut realisasi target mengalami kenaikan, pada tahun 2023 sebanyak 24 instansi pemerintah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota peduli HAM, tahun 2024 meningkat menjadi 25 Kabupaten/Kota.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Presentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah	4 Instansi pemerintah	4 Instansi pemerintah	4 Instansi pemerintah	35%

Tahun 2024, sebanyak 25 Kabupaten/Kota menerima predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dari 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat, maka realisasi target mencapai 92,59%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut;

- Melakukan rapat koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Instansi Pemerintah di wilayah Jawa Barat serta pemberian penguatan terkait evaluasi penilaian kabupaten/kota peduli HAM yang akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- Kantor Wilayah memastikan seluruh pengaduan masyarakat (YANKOMAS) telah ditindaklanjuti, karena hal ini merupakan salah satu indikator penilaian;

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah dalam pemenuhan data dukung.

4. Indikator Kinerja terkait Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

RANHAM adalah singkatan dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. RANHAM merupakan dokumen yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. RANHAM digunakan sebagai acuan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan HAM.

$$= \frac{\text{Jumlah Provinsi' Kab' Kota yg tercapai tahun berjalan}}{\text{Jumlah Provinsi' Kab' Kota di wilayah yg berpartisipasi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{27}{27} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat ditargetkan 75% Kabupaten/Kota melaksanakan program RANHAM/Aksi HAM. Berdasarkan data, sebanyak 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat telah melaporkan capaian aksi HAM, sehingga realisasi untuk target tersebut adalah 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan	75%	100%	133,33%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 133,33\%$$

Maka, capaian atas pelaksanaan RANHAM di kewilayahan adalah 133,33%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Presentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan	5 Instansi pemerintah	27 Instansi pemerintah	75%	100%

Terdapat perubahan target dari tahun 2023 ke tahun 2024, sebelumnya nilai satuan kemudian menjadi persentase, namun jika merujuk pada realisasi target sebenarnya

tidak terdapat perubahan. Pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 27 Instansi Pemerintah telah melaksanakan RANHAM/Aksi HAM.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Presentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan	5 Instansi pemerintah	5 Instansi pemerintah	5 Instansi pemerintah	75%

Tahun 2024, sebanyak 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat telah melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RANHAM, maka realisasi target mencapai 100%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah dalam rencana strategis.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian yang melampaui target tidak lepas dari hal-hal pendukung yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, meliputi;

- Melakukan koordinasi yang intens dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Instansi Pemerintah di wilayah Jawa Barat dalam hal pelaksanaan aksi HAM;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pelaporan aksi HAM secara periodik pada masing-masing daerah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan data dukung;
- Kantor Wilayah memastikan bahwa pelaporan aksi HAM setiap 4 bulan sekali (B04, B08, B12) diunggah oleh masing-masing instansi pemerintah ke website sapaham.kemenkumham.go.id.

5. Indikator Kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di kewilayahan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melakukan survei kepuasan masyarakat dan diperoleh nilai 3.91 dari target sebesar 3.33.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di kewilayahan	3.33	3.91	117,41%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.91}{3.33} \times 100\%$$

$$= 117,41\%$$

Maka, capaian kinerja terhadap indikator kinerja terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hak asasi manusia di kewilayahan adalah 117,41%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di kewilayahan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di kewilayahan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh proses pengimplementasian P2HAM pada Kantor Wilayah. P2HAM adalah Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan berpedoman pada prinsip HAM yang tidak diskriminatif, cepat, tepat dan berkualitas. Selain itu, pelayanan publik di Kantor Wilayah telah ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai seperti adanya parkir khusus disabilitas, kursi roda, *guiding block*, dsbnya.

6. Indikator Kinerja terkait Presentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Maka, dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia.

Pada bulan Juli 2024 telah dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM tentang Pecegahan dan Pengkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Karawang dan telah diterima jawaban dari pemerintah Kabupaten Karawang atas rekomendasi yang diberikan.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah rekomendasi produk hukum berperspektif HAM yang diberikan}}{\text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan	90%	100%	111,11%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% \\
 &= 111,11\%
 \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja mencapai 100% sedangkan target hanya 90%, maka capaian kinerja adalah 111,11%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan tidak dapat dibandingkan

dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Melakukan koordinasi dengan Subbidang FPPHD Kantor Wilayah selaku penanggungjawab yang melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pemerintah kabupaten Karawang selaku instansi terkait dalam rangka telahaan terkait Pecegahan dan Pngkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Karawang.

❖ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (BSK)

Indikator Kinerja terkait Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah melaksanakan evaluasi kebijakan dengan tema “Optimalisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor” dengan hasil pemberian rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi diantaranya penambahan BAP pada pasal 24.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\
 &= 125\%
 \end{aligned}$$

Realisasi persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti adalah 100%, maka capaian atas kinerja tersebut adalah 125%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan evaluasi didukung oleh keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan, hal ini bertujuan untuk membuka perspektif baru yang lebih komprehensif, sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan. Selain itu, perancangan kegiatan yang matang bertujuan agar kegiatan evaluasi dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan *output* yang diharapkan dan didukung dengan narasumber yang berpengalaman dan sesuai keahlian.

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (DIVISI PEMASYARAKATAN)

1. Indikator Kinerja terkait Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

- 1) Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
- 2) Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
- 3) Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- 4) Pengamanan dan Intelijen;
- 5) Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
- 6) Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan.

Perhitungan indeks tersebut berdasarkan mekanisme penilaian yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran dengan bobot 12.5%.

Rumus perhitungan untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned}
 X = & \{ (\text{Indeks pelayanan tahanan di wilayah} \times \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks pengelolaan basan baran di wilayah} \times \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah} \times \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah} \times \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah} \times \\
 & \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks pembinaan khusus anak di wilayah} \times \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah} \times \text{bobot}) + \\
 & (\text{Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah} \times \\
 & \text{bobot}) \}
 \end{aligned}$$

*Bobot = 12,5%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah	3.6	3.68	102,22%

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat di wilayah adalah sebagai berikut;

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seperti kejaksaan, kepolisian, antar Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan pihak eksternal lainnya;
- Pemberian hak-hak narapidana sesuai dengan prosedur (SOP) seperti pemberian bahan makanan (BAMA), bimbingan narapidana dengan berbagai program (bimbingan rohani, kepribadian dan bimbingan kerja) dan hak-hak lainnya seperti pemberian remisi dan integrasi;
- Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana melalui pemenuhan gizi, pemberian imunisasi, ketersediaan layanan Kesehatan berupa klinik, dsbnya;

2. Indikator Kinerja terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan reformasi birokrasi.

Kantor wilayah sebagai pembina yang membawahi 51 Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan Imigrasi memantau pelaksanaan reformasi birokrasi yang

meliputi pembangunan zona integritas dan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi melalui pemenuhan data dukung setiap triwulan yang selanjutnya akan dievaluasi secara berjenjang.

$$= \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Kanwil yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{32}{32} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Karena seluruh rencana aksi telah dilaksanakan maka realisasi kinerja adalah 100% dari target 100% yang artinya telah mencapai target yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyaraktan	100%	100%	100%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Seluruh rencana aksi reformasi birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah dilaksanakan dan mendapatkan nilai 100% dari hasil penilaian berjenjang. Maka, capaian kinerja tersebut adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyaraktan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyaraktan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien dan transparan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat untuk mencapai realisasi 100% dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada Seluruh pegawai dan Satuan Kerja tentang Road Map Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disertai dengan internalisasi indikator pelaksanaannya;
- Penyampaian Rencana Aksi setiap triwulan melalui sumaker kepada tiap bagian di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis disertai dengan target pemenuhan setiap triwulan;
- Melakukan monitoring dan Evaluasi berkala pertriwulan terhadap data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

3. Indikator Kinerja terkait Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan layanan kesekretariatan yang diberikan oleh instansi kepada seluruh pegawai, maka dianggap perlu untuk melakukan survei terhadap layanan yang telah diberikan, guna memberikan masukan dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai. Survei Indeks Layanan Kesekretariatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Nasional (BSK). Berikut rata-rata capaian hasil survei Unit Pelaksana Pemasarakatan di wilayah Jawa Barat;

SEPTEMBER	OKTOBER
2.48	2.78
RATA-RATA	2.63

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) diketahui bahwa rata-rata hasil survei terhadap kepuasan layanan kesekretariatan dari 42 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Jawa Barat adalah 2.63. Nilai tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	2.63	84.83%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.63}{3.10} \times 100\%$$

$$= 84.83\%$$

Maka, capaian kinerja terkait Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan adalah 84.83%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target terkait Indeks Layanan Kesekretariatan pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di wilayah Jawa Barat dikarenakan dalam pengisian survei terdapat banyak layanan yang harus dinilai, namun tidak semua layanan tersebut diakses oleh pegawai seperti layanan perencanaan, layanan kepegawaian terkait penyesuaian ijazah dan layanan BMN, sehingga mempengaruhi bobot penilaian. Selain itu, adanya ketidakpuasan pegawai terhadap layanan yang diakses menyebabkan tidak maksimalnya nilai yang diberikan saat survei, hal ini tentu menjadi hal yang harus segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh pegawai.

❖ PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (DIVISI KEIMIGRASIAN)

1. Indikator Kinerja terkait Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pro-yustisia keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian. Penegakan hukum pro-yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian prapenyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan perkara penyidikan.

Berdasarkan data tahun 2024, penegakan hukum pro-yustisia hanya dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, dimana dilakukan deportasi terhadap 4 Warga Negara Asing (WNA) dari Timor Leste, sedangkan pada 8 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi lainnya tidak terdapat penegakan hukum pro-yustisia. Berikut rumus perhitungan realisasi target berdasarkan manual IKU;

$$= \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum yg ditindaklanjuti di wilayah}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum yang di tangani di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 111\%$$

Capaian kinerja terkait Presentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah 111% karena seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar hukum keimigrasian diberikan penegakan hukum pro-yustisia.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase penegakan hukum pro-yustisia di kewilayahan yang ditangani tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Presentase penegakan hukum pro-yustisia di kewilayahan yang ditangani tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target;

- Adanya sistem hukum yang jelas, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana keimigrasian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Adanya hubungan kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan;
- Melakukan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap undang-undang keimigrasian yang bersifat pidana.

2. Indikator Kinerja terkait Presentase tindakan administratif keimigrasian di wilayah yang ditangani

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tindakan administratif keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan mengawasi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan akumulasi data dari 9 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Jawa Barat, terdapat sebanyak 533 orang Warga Negara Asing (WNA) yang menerima tindakan administratif keimigrasian.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jmlh kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yg diselesaikan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yg ditangani}} \times 100\% \\
 &= \frac{533}{533} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Seluruh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing telah ditangani dan selesai maka realisasi mencapai 100% dari target 90% yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 111\%$$

Tindakan administratif keimigrasian seluruhnya telah ditindaklanjuti maka capaian kinerja adalah 111%, dari realisasi sebesar 100% dengan target 90%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait presentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait presentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target;

- Melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Jawa Barat;
- Melakukan penegakan hukum yang konsisten dan adil kepada seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang ada di wilayah Jawa Barat yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Infrastruktur dan teknologi yang memadai yang dapat mempermudah pendeteksian dan penanganan pelanggaran keimigrasian.

3. Indikator Kinerja terkait Presentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diterima

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Keimigrasian, Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang membawahi 9 Unit Pelaksana Teknis Imigrasi melakukan layanan keimigrasian seperti layanan lalu lintas keimigrasian dan izin tinggal keimigrasian. Berikut data jumlah permohonan layanan pada 9 Kantor Imigrasi se-Jawa Barat;

JUMLAH LAYANAN PASPOR TAHUN 2024 PADA 9 KANTOR IMIGRASI					
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
57.930	48.939	43.074	33.743	45.145	38.351
JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
53.157	53.101	49.789	58.832	50.859	22.815
TOTAL : 555.735 PERMOHONAN					

JUMLAH LAYANAN IZIN TINGGAL TAHUN 2024 PADA 9 KANTOR IMIGRASI					
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
3.384	2.658	2.908	2.165	3.077	2.947
JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
3.807	3.366	3.123	3.005	3.172	0
TOTAL : 33.512 PERMOHONAN					

Berdasarkan data di atas, jumlah total permohonan terhadap layanan keimigrasian dari 9 Kantor Imigrasi di wilayah Jawa Barat adalah 589.257 permohonan layanan dan seluruh permohonan tersebut telah diselesaikan.

$$= \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan yang diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{589.257}{589.257} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Seluruh permohonan yang masuk telah diselesaikan maka realisasi indikator kinerja adalah 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase layanan keimigrasian di wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%

terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
---	--	--	--

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 111\%$$

Realisasi layanan keimigrasian di wilayah Jawa Barat yang diselesaikan adalah 100% dan target 90%, maka capaian indikator tersebut adalah 111%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait presentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait presentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target terkait Indeks Layanan Kesekretariatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Jawa Barat dikarenakan dalam pengisian survei terdapat banyak layanan yang harus dinilai, namun tidak semua layanan tersebut diakses oleh pegawai seperti layanan perencanaan, layanan kepegawaian terkait penyesuaian ijazah dan layanan BMN, sehingga mempengaruhi bobot penilaian. Selain itu, adanya ketidakpuasan pegawai terhadap layanan yang diakses menyebabkan tidak maksimalnya nilai yang

diberikan saat survei, hal ini tentu menjadi hal yang harus segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh pegawai.

4. Indikator Kinerja terkait Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka seluruh instansi pemerintah wajib melaksanakan reformasi birokrasi.

Kantor wilayah sebagai Pembina yang membawahi 51 Unit Pelaksana Teknis yaitu Pemasarakatan dan Imigrasi memantau pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi pembangunan zona integritas dan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi melakukan pemenuhan data dukung setiap triwulan yang selanjutnya akan dievaluasi secara berjenjang.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Kanwil yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{32}{32} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sebanyak 32 rencana aksi yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, sehingga realisasi kinerja mencapai 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	100%	100%	100%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Maka, capaian kinerja terkait persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Unit Pelaksana Teknis Imigrasi adalah 100%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Keberhasilan

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien dan transparan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat untuk mencapai realisasi 100% dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada Seluruh pegawai dan Satuan Kerja tentang Road Map Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disertai dengan internalisasi indikator pelaksanaannya;
- Penyampaian Rencana Aksi setiap triwulan melalui sumaker kepada tiap bagian di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis disertai dengan target pemenuhan setiap triwulan;
- Melakukan monitoring dan Evaluasi berkala pertriwulan terhadap data dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

5. Indikator Kinerja terkait Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Dalam rangka meningkatkan layanan kesekretariatan yang diberikan oleh instansi kepada seluruh pegawai, maka dianggap perlu untuk melakukan survei terhadap layanan yang telah diberikan, guna memberikan masukan dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pegawai. Survei Indeks Layanan

Kesekretariatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Nasional (BSK).

Berikut rata-rata capaian hasil survei Unit Pelaksana Pemasarakatan di wilayah Jawa Barat;

SEPTEMBER	OKTOBER
1.92	3.69
RATA-RATA	2.80

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan sekretariatan	3.1	2.80	90.32%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.80}{3.10} \times 100\% \\
 &= 90.32\%
 \end{aligned}$$

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan sekretariatan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Startegis

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan sekretariatan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator tersebut tidak ada dalam rencana strategis sebelum revisi.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

e) Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target terkait Indeks Layanan Sekretariatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Jawa Barat dikarenakan dalam pengisian survei terdapat banyak layanan yang harus dinilai, namun tidak semua layanan tersebut diakses oleh pegawai seperti layanan perencanaan, layanan kepegawaian terkait penyesuaian ijazah dan layanan BMN, sehingga mempengaruhi bobot penilaian. Selain

itu, adanya ketidakpuasan pegawai terhadap layanan yang diakses menyebabkan tidak maksimalnya nilai yang diberikan saat survei, hal ini tentu menjadi hal yang harus segera diperbaiki guna meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh pegawai.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memiliki 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut;

NO	PROGRAM	TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat		52.403.338.000	49.674.681.437	94.79
1.	Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)	32.561.633.000	30.020.575.309	92.20
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)	5.774.975.000	5.774.433.700	99.99
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	3.591.964.000	3.542.323.350	98.62
4.	Program Pembentukan Regulasi (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)	472.380.000	472.307.000	99.98
5.	Program Pembentukan Regulasi (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	5.210.152.000	5.075.206.900	97.41
6.	Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)	361.420.000	361.097.200	99.91
7.	Program Dukungan Manajemen (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)	312.279.000	312.228.700	99.98
8.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Pemasarakatan)	1.535.149.000	1.473.594.799	95.99
9.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Direktorat Jenderal Keimigrasian)	2.583.386.000	2.111.514.871	81.73

(data serapan anggaran per 31 Desember 2024)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.403.338.000 dan per-tanggal 30 Desember 2024 realisasi anggaran mencapai Rp. 49.674.681.437 dengan presentase sebesar 94.79%.

DIPA	JUMLAH ABT	KETERANGAN
DIPA Setjen	2.049.543.000	Belanja Pegawai
	2.152.799.000	Belanja Operasional
	3.799.345.000	ABT Pengadaan CPNS
DIPA Imigrasi	960.228.000	Belanja Non-Operasional
DIPA KI	454.859.000	Belanja Non-Operasional

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2024, Kantor Wilayah mendapatkan beberapa kali Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp. 8.001.687.000 untuk DIPA Sekretariat Jenderal (Program Dukungan Manajemen), DIPA Imigrasi (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum) dan DIPA Kekayaan Intelektual (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum) dengan rincian sebagai berikut;

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

NO	PROGRAM	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Kanwil Jawa Barat		52.403.338.000	49.674.681.437	94.79	51.622.355.000	51.232.485.251	99.24
1	Div. Admin - Dukman	32.561.633.000	30.020.575.309	92.20	35.481.205.000	35.135.124.078	99.02
2	Div. Yankum – AHU	5.774.975.000	5.774.433.700	99.99	5.154.300.000	5.153.702.123	99.99
3	Div. Yankum - KI	3.591.964.000	3.542.323.350	98.62	2.371.212.000	2.370.590.450	99.96
4	Div. Yankum - PP	472.380.000	472.307.000	99.98	372.380.000	372.289.300	99,98
5	Div. Yankum - BPHN	5.210.152.000	4.995.825.900	95.89	5.249.927.000	5.209.916.200	99.24
6	Div. Yankum – HAM	361.420.000	361.097.200	99.91	269.706.000	268.540.350	99.57
7	Div. Yankum - BSK	312.279.000	312.228.700	99.98	194.654.000	194.494.300	97.92
8	Div. Pemasarakatan	1.535.149.000	1.533.594.799	99.90	1.064.873.000	1.064.465.500	99.96
9	Div. Imigrasi	2.583.386.000	2.582.914.479	99.98	1.464.098.000	1.463.362.950	99.95

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa anggaran tahun 2024 meningkat sebanyak Rp. 780.983.000 dari tahun 2023, peningkatan anggaran terbesar yaitu DIPA Sekretariat Jenderal (Dukungan Manajemen), Subbidang Kekayaan Intelektual dan Divisi Imigrasi. Realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 sudah sangat baik dengan deviasi di bawah 10%, hal ini berarti proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah sangat baik.

C. Capaian Kinerja Anggaran

▪ IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 3 aspek dan 8 indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu;

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a) Revisi DIPA (10%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a) Penyerapan Anggaran (20%)
 - b) Data Kontrak (10%)
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e) Dispensasi SPM (5%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a) Capaian Output (25%)

Berikut capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;

Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)		Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA (10%)	Deviasi Halaman III (10%)	Penyerapan Anggaran (20%)	Belanja Kontraktual (10%)	Penyelesaian Tagihan (10%)	UP & TUP (10%)	Capaian Output (25%)				
KANWIL DITJEN PAS	100	100	100	0	0	99.11	100	79.91	80%	0	99,89
KANWIL BPHN	100	89.21	97.28	0	0	95.95	100	77.43	80%	0	96,79
KANWIL DITJEN PP	100	94.11	100	0	0	99.27	100	79.04	80%	0	98,8
KANWIL DITJEN HAM	100	100	100	0	0	99.08	100	79.91	80%	0	99,89
KANWIL BALITBANGHAM	100	100	100	0	0	96.68	100	79.67	80%	0	99,59
KANWIL DITJEN IMIGRASI	100	100	97.71	0	0	0	100	69.54	70%	0	99,35
KANWIL DITJEN KI	100	100	98.61	100	100	0	100	89.72	90%	0	99,69
KANWIL DITJEN AHU	100	100	99.20	100	100	0	100	89.84	90%	0	99,82
KANWIL DIVISI ADMINISTRASI	100	100	97.57	100,00	100	100	100	99.51	100%	0	99,51
NILAI RATA-RATA											99,26

(tabel capaian IKPA 9 DIPA per November 2024)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 dari 9 DIPA adalah 99.26 dengan predikat sangat baik. Keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam meraih nilai IKPA yang sangat baik menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan kualitas pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan baik, hasil ini merupakan cerminan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

▪ SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis *website* yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Berikut capaian nilai SMART pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat terhadap pelaksanaan 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

No	Satker	Nilai SMART 2024		Predikat
		Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	
1	KANWIL (AHU)	37.50	49.91	BAIK
2	KANWIL (DIV PAS)	37.50	49.95	BAIK
3	KANWIL (DIV IMI)	37.02	49.67	BAIK
4	KANWIL (KI)	36.02	49.85	BAIK
5	KANIWL (PP)	37.50	49.96	BAIK
6	KANWIL (HAM)	37.50	49.95	BAIK
7	KANWIL (SETJEN)	37.50	49.76	BAIK
8	KANWIL (BPHN)	42.02	48.40	SANGAT BAIK
9	KANWIL (BSK)	37.50	49.80	BAIK

(data SMART per November 2024)

D. Capaian Kinerja Lainnya

▪ Kegiatan Prioritas Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki 7 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan. Dari ketujuh Prioritas Nasional tersebut, terdapat 1 Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yaitu Prioritas Nasional ke-7 terkait “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dalam hal ini terdapat kegiatan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum litigasi ditargetkan sebanyak 562 permohonan dan bantuan hukum non-litigasi sebanyak 63 permohonan berdasarkan anggaran yang diberikan.

Data per-Desember 2024, jumlah permohonan bantuan litigasi yang masuk adalah 1.185 permohonan dan yang diberikan karena telah sesuai dengan prosedur sebanyak 1.068 permohonan. Sedangkan jumlah permohonan bantuan hukum non-litigasi yang masuk adalah 238 permohonan dan yang diberikan karena telah sesuai dengan prosedur sebanyak 307 permohonan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa realisasi telah melebihi target yang ditetapkan, bahkan melampaui sangat jauh dari target yang telah ditetapkan.

▪ E-performance

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian

kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. *E-performance* dapat diakses melalui website e-performance.kemencumham.go.id.

Pelaporan kinerja pada *e-performance* dilakukan setiap triwulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Pada tahun 2024 terdapat 18 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada periode Januari-Juni, capaian target masing-masing indikator kinerja kegiatan telah diinput.

▪ Rencana Aksi

Rencana Aksi Percepatan atas Perjanjian Kinerja merupakan sarana pengendalian percepatan Capaian Kinerja turunan dari Perjanjian Kinerja Prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana Aksi Percepatan atas Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat 21 Rencana Aksi, Dimana ini juga diangkat dari Isu Permasalahan yang dipecahkan menjadi Target Rencana Aksi yang harus dilaksanakan. Rencana Aksi Percepatan atas Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada 4 divisi yaitu :

1. Sembilan Rencana Aksi pada Divisi Administrasi meliputi Pendampingan Penyusunan LKJIP, Data Kompetensi Kemencumham, terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Penyusunan Rencana RKBMN, Penyusunan Laporan Wasdal, Rekapitulasi Data Aplikasi Khusus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi Non Litigasi dan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas;
2. Tujuh Rencana Aksi pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusa meliputi Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Permasalahan Bisnis dan HAM di Kota Cirebon, Terbentuknya Kelompok Kadarkum sebanyak 103 Desa/Kabupaten, Terakreditasinya dan Terverifikasinya Organisasi Bantuan Hukum sebanyak 619, tersosialisasi fidusia dengan baik dan terdata nya Notaris se-Jawa Barat, Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Promosi Merk Kolektif dan Indikasi Geografis dengan Tema “Menuju Jawa Barat Kaya dengan Kekayaan Intelektual” pada Tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Santika Premiere Linggarjati Kuningan, Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual pada 12 Sekolah SMK dan SMP yang tersebar di Jawa Barat, Kegiatan Sosialisasi Indek Reformasi Hukum;
3. Satu Rencana Aksi pada Divisi Pemasarakatan meliputi Kegiatan Pemetaan Kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan Wilayah Jawa Barat, telah dilaksanakan nya Sosialisasi SPPT TI di Wilayah, Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Pemasaran dan

pembelian produk lepas melalui e katalog di Wilayah.

4. Empat Rencana Aksi pada Divisi Keimigrasian. Kegiatan dilaksanakan dengan cara melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan dan Capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja B01 – B12 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2024, yang terdiri dari : terlaksananya pelayanan M-paspor dan Pengawasan pada penerbitan paspor, terbentuknya Desa binaan pada Provinsi Jawa Barat sendiri terdiri dari 18 (delapan belas) Kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota, dan pengawasan dalam penegakan hukum keimigrasian.

❖ DIVISI ADMINISTRASI

1. Isu Permasalahan No. 1 :

Evaluasi terhadap Capaian Kinerja tidak dilakukan seluruh Satuan Kerja secara Periodik

- Pendampingan Penyusunan LKjIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah melaksanakan rangkaian Pendampingan Penyusunan LKjIP dengan Realisasi Pagu sebesar Rp. 24.810.000 antara lain :
 - Sosialisasi Penyusunan LKjIP kepada Unit Pelaksana Teknis se – Jawa Barat pada Tanggal 16 Januari 2023;
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengikuti Pendampingan Penyusunan LKjIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tanggal 12 – 15 Desember 2023;
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengikuti BIMTEK Penyusunan LKjIP yang dilaksanakan oleh BPSDM pada Tanggal 26 – 29 Februari 2024;
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat juga melakukan Sosialisasi Penyusunan LKjIP kepada Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Barat pada Tanggal 4 – 6 Maret 2024.

2. Isu Permasalahan No. 3 :

Data Pengembangan Kompetensi Kemenkumham yang Belum Dilakukan Secara Keseluruhan

- Pemuktahiran Data (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, dan

Data Disiplin)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah Menyusun Laporan Pemuktahiran Data Tahun 2023 dengan keterangan jumlah pegawai 3750 orang, Dimana persentase kesesuaian terkait Data Pendidikan (93%), persentase pegawai yang sesuai standar kompetensi jabatan (43%), persentase pegawai yang telah mengunggah dokumen evaluasi kinerja (93%), dan Persentase Pegawai yang sedang Menjalani Hukuman Disiplin (1%).

- Pemetaan Data (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, dan Data Disiplin)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah Menyusun Laporan Pemetaan Data Tahun 2023 dengan keterangan jumlah pegawai yang akan berubah kualifikasi pendidikannya 3712 orang, Dimana persentase kesesuaian terkait Data Pendidikan (20%), persentase pegawai yang sesuai standar kompetensi jabatan (96%), persentase pegawai yang telah mengunggah dokumen evaluasi kinerja (0%), dan Persentase Pegawai yang sedang Menjalani Hukuman Disiplin (0%). Kantor Wilayah juga telah menyampaikan usulan Pengembangan Kompetensi pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Biro SDM melalui surat pada tanggal 27 Maret 2024, dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 JP bagi setiap pejabat/pegawai dalam 1 tahun.

- Implementasi *Corporate University* di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham 25% Per Triwulan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Kegiatan *Corporate University*, salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan *Corporate University* di lingkungan Kantor Wilayah, dilaksanakan pada tanggal 25 Januari s/d 2 Februari Tahun 2024 dalam bentuk Diskusi Penerapan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 dan Pendampingan Penyusunan PAK bagi Pejabat Fungsional berdasarkan penilaian kinerja, sedangkan terkait Pengembangan Pegawai melalui Implementasi *Corporate University* selama 1 tahun sudah mencapai 100%.

3. Isu Permasalahan No. 4 :

Belum Optimalnya Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap Capaian IKPA

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2024
- Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, II, dan III Tahun Anggaran

2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di Wilayah Ciayumajakuning pada Triwulan I, Priangan Timur di Triwulan II, dan Wilayah Bogor Raya pada Triwulan III.

4. Isu Permasalahan No. 5 :

Satuan Kerja belum Menyampaikan Usulan RKBMN

- Kegiatan pra penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun 2026 dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat kepada Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dilakukan menggunakan zoom meeting, dilaksanakan pada tanggal 26 juli 2024 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Suhendro Hendarsin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

5. Isu Permasalahan No. 6 :

Satuan Kerja belum Menyampaikan Laporan Wasdal Tepat Waktu dan Belum Sesuai Ketentuan

- Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, sampai dengan penghapusan BMN dan tindaklanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya ditatausahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Kuantitas BMN pada Semester II TA 2023 yang sudah dilakukan Penetapan Status Penggunaan Sejumlah 5.096 dengan Nilai buku 223.821.293.226 dan kuantitas BMN yang belum dilakukan penetapan status penggunaan sejumlah 230 dengan nilai buku 41.307.459.511. Persentase kesesuaian Penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan 100 %.
- Kuantitas BMN pada Semester I TA 2024 yang sudah dilakukan Penetapan Status Penggunaan Sejumlah 4.692 dengan Nilai buku 226.373.523.492 dan kuantitas BMN yang belum dilakukan penetapan status penggunaan sejumlah 354 dengan nilai buku 63.597.491.601. Persentase kesesuaian Penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan 22%.

6. Isu Permasalahan No. 7 :

Belum Optimalnya Kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

- Unit Kearsipan II Kantor Wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban untuk melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Unit Kearsipan III (Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM di Lingkungan Jawa Barat).
- Kegiatan Pengawasan Kearsipan dilaksanakan pada :
 - Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 5 Februari 2024 di Ruang Record Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Jalan Jakarta No 27 Batununggal Kota Bandung
 - Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 20 Mei 2024 pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Rumah Tahanan Kelas I Bandung, dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok.
 - Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Nomor W.11-PW.02.04-8464 pada Tanggal 23 Juli tentang melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Tanggal 24 s/d 25 juli 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bandung, Rupbasan Kelas I Bandung, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cikarang, Balai Pemasarakaytan Kelas II Bekasi, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sentul, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor, Balai Pemasarakatan Kelas IIA Bogor dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi

7. Isu Permasalahan No. 8 :

Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Pelaksanaan Rekapitulasi Data Aplikasi Khusus di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2024 ini dilakukan dengan maksud untuk menginventaris jumlah aplikasi yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIMDATIN). Telah dilakukan Pengarahan Uji Keamanan dan Penonaktifan Aplikasi Khusus Hasil Verifikasi dan Uji Kelayakan Aplikasi Khusus

Tahun 2023 pada Hari Senin, 6 Mei 2024 Pukul 09.00 – 10.00 WIB.

- Dari 26 (dua puluh enam) Pembangunan Aplikasi yang diajukan, hanya 7 (tujuh) Aplikasi yang di terima dan dilanjutkan Pembangunan tahap aplikasi selanjutnya, dan 19 (Sembilan belas) aplikasi yang usulannya ditolak oleh Unit utama pada tahapan verifikasi dengan berbagai jenis kriteria penolakan.

8. Isu Permasalahan No. 9

Pengawasan atas Capaian Prioritas Nasional (PN) belum Optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham

- Pemberi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi serta berbadan hukum diwilayah Jawa Barat pada periode verifikasi dan akreditasi di tahun 2022 s/d 2024 mengalami peningkatan jumlah. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 20-22 – 2024 jumlah pemberi bantuan hukum se Indonesia yaitu 619 (enam ratus Sembilan belas) Organisasi Bantuan Hukum, dan untuk di Jawa Barat terdiri dari 49 (empat puluh Sembilan) Organisasi Bantuan Hukum.

9. Isu Permasalahan No. 10

Penerapan Integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK

- Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2024, dengan tujuan untuk menginternalisasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas kepada Pegawai dan Masyarakat. Adapun kegiatan Sosialisasi dilaksanakan secara langsung berupa pemasangan spanduk, *banner*, pamphlet, *slider* pada *standing PC* dan bahan informasi lainnya pda ruangan layanan dan area strategis lainnya meupun secara online melalui pemasangan *slider* dan *pop-up* pada website dan postingan pada media social.

❖ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM****1. Isu Permasalahan No. 4 [Ditjen PP]**

Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- Kegiatan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan Perundang – Undangan dalam perharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah. Dilakukannya proses pengharmonisasian rancangan Peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah, rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, dan rancangan peraturan kepala daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan menginput data tersebut kedalam aplikasi SIPDDAH dengan rincian sebagai berikut :
 - Raperda (Pemda) : 58 Raperda
 - Raperda (DPRD) : 32 Raperda
 - Raperkada : 137 Raperkada

2. Isu Permasalahan No. 2 [Ditjen HAM]

Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah

- Terlaksanya Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Permasalahan Bisnis dan HAM di Kota Cirebon yang dilaksanakan pada Hari Kamis – Jum’at, 07 – 08 November 2024 yang bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan pemetaan terkait penanganan Pengaduan Permasalahan Bisnis dan HAM berdasarkan data yang diberikan oleh Disnaker Kota Cirebon.

3. Isu Permasalahan No. 2.a [BPHN]

Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasarana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut)

- Program peningkatan kesadaran hukum Masyarakat melalui kelompok kadarkum di setiap desa/kelurahan merupakan salah satu Upaya yang dilakukan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dalam Upaya menguatkan keberadaan Masyarakat yang patuh akan hukum yang mencerminkan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Secara Khusus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat melaksanakan pembinaan dan pembentukan kelompok Kadarkum dan telah berhasil membentuk Kelompok Kadarkum dengan total 103 Desa/Kelurahan.

4. Isu Permasalahan No. 2.b [BPHN]

Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Kabupaten/Kota

- Layanan Bantuan Hukum merupakan salah satu program prioritas pemerintah tahun 2023, berdasarkan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat meminimalisir setiap warga yang berperkara untuk diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, yakni secara nonlitigasi. Jalur non litigasi diantaranya berupa kegiatan preventif secara Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan represif adjudikatif berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik lainnya yang pada prinsipnya diselesaikan diluar pengadilan.
- Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi serta berbadan hukum di wilayah Jawa Barat pada periode verifikasi dan akreditasi Tahun 2022 s/d 2024 mengalami peningkatan jumlah. Jumlah pemberi bantuan hukum se Indonesia yaitu 619 (enam ratus Sembilan belas) Organisasi Bantuan Hukum, dan untuk di Jawa Barat terdiri dari 49 (empat puluh Sembilan) Organisasi Bantuan Hukum dengan Klasifikasi sebagai berikut :
 - Akreditasi A, 2 (dua) Organisasi Bantuan Hukum
 - Akreditasi B, 10 (Sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum
 - Akreditasi C, 37 (tiga puluh tujuh) Organisasi Bantuan Hukum

5. Isu Permasalahan No. 2.c [BPHN]

Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) 3 Tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata – rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN Rata – rata 98,70%.

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat melaksanakan Sosialisasi serta koordinasi *Paralegal Academy*, pada tanggal 18 Desember 2023 melalui Zoom Meeting. Hasil rekapitulasi tahapan penilaian Seleksi Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 29 – 30 April 2024 adalah :
 - Kategori Non Litigation Peacemaker : Dari 59 Peserta Kades/lurah, ada 44 Kades/Lurah yang direkomendasikan, dan 15 Kades/lurah yang tidak

direkomendasikan.

- Kategori Anubhawa Sasana Jagadhita : Dari 35 Peserta Kades/lurah, ada 19 Kades/Lurah yang direkomendasikan, dan 16 Kades/lurah yang tidak direkomendasikan.

6. Isu Permasalahan No. 1 [Ditjen AHU]

Belum tersedianya pemuktahiran Data Fidusia dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia

- Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya
- Melaksanakan Sosialisasi Layanan Fidusia pada Hari Rabu, 5 Juni 2024 bertempat di Meeting Room Q Garden Restaurant Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 26, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon

7. Isu Permasalahan No. 2 [Ditjen AHU]

Masih terdapat Ketidaksinkronan Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat secara intensif berupaya mensinkronkan Data Notaris antara Direktorat Jenderal AHU dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat. Jumlah Notaris pada Wilayah Jawa Barat berjumlah 3.837 Notaris.

8. Isu Permasalahan No. 1 [Ditjen KI]

Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya Permohonan Indikasi Geografis

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan kegiatan Sosialisasi dan Promosi Merk Kolektif dan Indikasi Geografis dengan Tema “Menuju Jawa Barat Kaya dengan Kekayaan Intelektual” pada Tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Santika Premiere Linggarjati Kuningan.

9. Isu Permasalahan No. 2 [Ditjen KI]

Mempercepat Pertumbuhan Permohonan Merk Kolektif melalui One Village One Brand di Wilayah melalui Kerjasama Pemerintah Daerah/Stakeholder terkait/Masyarakat

- Kegiatan One Village One Brand ini dimaksudkan untuk menumbuhkan permohonan pendaftaran merek kolektif melalui Kerjasama antara Kantor Wilayah dengan stakeholder KI di Wilayah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan Permohonan Merk Kolektif.

10. Isu Permasalahan No. 3 [Ditjen KI]

Kualitas Penataan Regulasi yang belum merata dibuktikan dengan Tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Penilaian IRH belum Optimal

- Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual pada 12 Sekolah SMK dan SMP yang tersebar di Jawa Barat

11. Isu Permasalahan No. 4 [Ditjen KI]

Kolaborasi dalam memberikan layanan Kekayaan Intelektual di Daerah dengan Stakeholder untuk menyebarkan pemahaman potensi dan meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

- Kepemilikan Kekayaan Intelektual juga mempengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar Merk Dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya.

12. Isu Permasalahan No. 5 [Ditjen KI]

Meningkatkan Permohonan Desain Industri dalam Negeri melalui Inventarisasi Data Potensi Desain Industri di 33 Provinsi

- Asistensi Teknis bertujuan untuk mendorong pemanfaatan informasi paten sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi untuk inovasi lebih lanjut. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas Kantor Wilayah dalam mendukung para pemangku kepentingan local, seperti perusahaan, peneliti, dan institusi Pendidikan, dalam hal penelusuran dan pemanfaatan informasi paten.

13. Isu Permasalahan No. 3 [BSK]

Meningkatkan Pemahaman Kesadaran Masyarakat, stakeholder dan APH atas pentingnya Perlindungan HKI

- Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Selasa, 27 Februari 2024 di Ruang Rapat Romli Atmasasmita. Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Indeks Reformasi Hukum ini ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Menyusun Tim Kerja dan Tim Asesor tahun 2024.

❖ DIVISI PEMASYARAKATAN

1. Isu Permasalahan No. 1 [Divisi Pemasyarakatan]

Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Wilayah

- Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan PK dan APK pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan Wilayah Piloting oleh Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat. Pembantu pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan untuk melaksanakan :

- Litmas untuk Perawatan Tahanan/anak
- Litmas untuk Pembinaan Awal
- Litmas untuk Pemindahan
- Litmas Asimilasi, Litmas Integrasi, dan Litmas CMK

Telah dilaksanakan juga kegiatan berupa Sosialisasi SOP Litmas Online di Wilayah Jawa Barat oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan secara Virtual pada Jum'at Tanggal 27 September Pukul 08.00 s.d 11.00

- Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan

Sistem Penanganan Perkara Pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi atau dikenal sebagai SPPT TI, dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan dengan keterpaduan system yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil. Data pada SDP bertambah menjadi 5 yaitu :

- Surat Lepas
- Surat Pemberitahuan Habis Masa Penahanan
- Surat Pemberitahuan Pemindahan Tahanan
- Laporan Hasil Penelitian Litmas
- Laporan Lengkap Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

- Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemasaran dan Pembelian Produk Lapas Produktif melalui e-katalog di Wilayah.

Salah satu ukuran keberhasilan Penyelenggaraan Pemasarakatan dilaksanakan kegiatan industry di Lapas Produktif sebagai wadah pembinaan agar narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha, bahwa rangka mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan kegiatan Industri di Lapas Produktif. Untuk Wilayah Jawa Barat terdapat 10 Lapas yang ditetapkan sebagai Lapas Produktif, sedangkan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH.01.OT.01.03 Tahun 2021, ditetapkan Pilot Project Lembaga Pemasarakatan yang menyelenggarakan Kegiatan Produktif sebagai berikut :

- Lapas Kelas I Cirebon (Konveksi, dan rotan sintetis)
- Lapas Kelas IIA Cibinong (Pternakan)
- Lapas Kelas IIA Karawang (Perikanan, Pertanian)
- Lapas Kelas IIA Cikarang (Industri plastic)

❖ DIVISI KEIMIGRASIAN

1. Isu Permasalahan No. 20 [Ditjen Imigrasi]

Perluasan Pelayanan E-Paspor di Seluruh Kantor Imigrasi

- Implementasi Layanan M-Paspor dilingkungan Kantor Imigrasi Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan bagian integral dan inisiatif pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan public, khususnya dalam bidang keimigrasian.

2. Isu Permasalahan No. 21 [Ditjen Imigrasi]

Tingginya demand Paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi

- Analisa data penerbitan paspor di Kantor Imigrasi (Kanim) seluruh Jawa Barat menunjukkan disparitas yang signifikan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam jumlah penerbitan Paspor, diikuti oleh Kanim Bogor dan Bekasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara permintaan paspor dan karakteristik demografis serta sosioekonomis wilayah tersebut. Kegiatan Peningkatan penerbitan paspor elektronik telah dilaksanakan dengan jumlah permohonan 526.199 dan Jumlah Penerbitan sebesar 555.735.

3. Isu Permasalahan No. 22 [Ditjen Imigrasi]

Meningkatnya Kasus TPPI dan TPPM Lintas Negara

- Meningkatnya Kasus TPPI dan TPPM Lintas negara yang berfokus pada kompilasi terkait evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan desa binaan di Satuan Kerja Keimigrasian, pada Provinsi Jawa Barat sendiri terdiri dari

18 (delapan belas) Kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota.

4. Isu Permasalahan No. 23 [Ditjen Imigrasi]

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian belum optimal

- Pengawasan dan penindakan keimigrasian merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang kami laksanakan, rata – rata posisi Lokasi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) kebanyakan berada di daerah Jabodabekjur (Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi – Cianjur). Adapun pulbaket yang dilaksanakan, masih menggunakan cara manual dengan metode pemeriksaan melalui laporan bulanan Perusahaan pengguna TKA, penarikan data melalui aplikasi SIMFONI, laporan dari Satuan Kerja Keimigrasian, dan informasi instansi terkait/stakeholder.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2024 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Tahun 2024 terdapat 18 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari 28 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebanyak 25 Indikator Kinerja mencapai target dan 4 Indikator Kinerja tidak mencapai target, yaitu;
 - Indikator Kinerja terkait Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah;
 - Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah;
 - Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan;
 - Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.
- 2) Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 52.403.338.000 yang dibagi ke dalam 9 DIPA. Per tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran sudah mencapai 94.79% atau sebesar Rp. 49.674.681.437 dengan deviasi dibawah 10%;
- 3) Dari sisi kinerja anggaran, nilai rata-rata IKPA dari 9 DIPA adalah 99.26 dan nilai SMART dibagi menjadi 2 penilaian yaitu sangat baik dan baik;
- 4) Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi informasi demi kemudahan. Setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang, berikut hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/tindaklanjut;

- 1) Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkalan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi sehingga dapat disusun solusi dan langkah-langkah yang harus diambil;
- 2) Meningkatkan pemantauan/*monitoring* kinerja kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang bertujuan untuk mengukur capaian realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan setiap triwulan, semester maupun tahunan;
- 3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Kantor Wilayah melalui diklat/seminar/bimtek/*workshop* yang sesuai dengan bidang keahliannya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 4) Memperbanyak kegiatan diseminasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat, dikarenakan cakupan wilayah yang cukup luas maka penyebaran informasi belum maksimal;
- 5) Menjawab isu krusial terkait wilayah Jawa Barat yang luas, maka Kantor Wilayah memanfaatkan sarana teknologi informasi guna memudahkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga layanan dapat diakses dimana dan kapan saja;
- 6) Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan *stakeholders* terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 tahun kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.



LAMPIRAN

PRESTASI TAHUN 2024

- 1) Kategori Kantor Wilayah Terbaik dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM) Regional Barat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
- 2) Penghargaan Peringkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Periode Semester I Tahun 2024 dengan kategori Satker dengan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di atas Rp. 7 Miliar s.d Rp. 30 Miliar;
- 3) Pengelola JDIHN Terbaik III di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Penghargaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat atas Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2024;
- 5) Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
- 6) Kantor Wilayah Terbaik ke I dengan Kategori Persentase Pertumbuhan, Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 – 2024;
- 7) Kantor Wilayah Terbaik ke II dengan Kategori Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum Terbanyak di Wilayah Tahun 2024.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.


Masjuno
NIP. 197208131994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

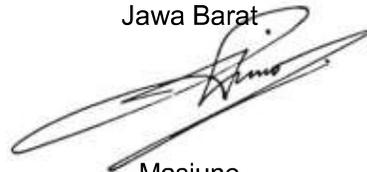
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 24.559.946.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 24.559.946.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.774.975.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 5.774.975.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat



Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.220.014.106.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.220.014.106.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp.317.784.376.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp.317.784.376.000,-

Bandung, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 24 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim

Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Silmy Karim

Masjuno
NIP. 197208131994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 28.484.550.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 28.484.550.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 114.775.380.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 114.775.380.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Silmy Karim



Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Masjuno
NIP. 197208131994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.137.105.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 3.137.105.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Masjuno
NIP. 197208131994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	24 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 472.380.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 472.380.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001



Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 361.420.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 361.420.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001


 Masjuno
 NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Masjuno
NIP. 197208131994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

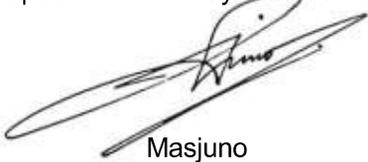
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 144.059.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 144.059.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.212.388.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 5.212.388.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat


Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 312.279.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 312.279.000,-

Jakarta, 24 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Barat



Masjuno
NIP. 197208131994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjuno

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 April 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Barat

Masjuno
NIP. 197208131994031002